Profit: Jurnal Manajemen, Bisnin dan Akuntansi
Volume 5 Nomor 3 Agustus 2025
e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal. 579-590
DOI: https://doi.org/10.58192/profit.v5i3.4869
Tersedia: https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Villy Varensi[1*], Nopita Sari [2], Lisa Martisah[3], Baihaqi[4]
[1-4]Universitas Bengkulu, Indonesia
Email: villyvrns@gmail.com[1], nopitasari@unib.ac.id[2], lisa_mnp@unib.ac.id[3], baihaqi.netty@gmail.com[4]
**Penulis Korespondensi: villyvrns@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effects of Government Accounting Standards (SAP) and the Regional Government Information System (SIPD) on financial statement quality and examine the moderating role of the Government Internal Control System (SPIP). The study is motivated by persistent issues in regional financial management, including inconsistencies in financial statement presentation with applicable standards. A quantitative approach with a survey design is employed, covering Regional Government Organizations (OPDs) in Central Bengkulu Regency and North Bengkulu Regency, Indonesia. The study population comprises all OPD Financial Administration Officers in both regencies, with a saturated sampling technique. Primary data are collected through questionnaires using a Likert scale. Data are analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS version 3. The analysis includes measurement model evaluation to assess validity and reliability, as well as structural model evaluation to examine relationships among variables and test the research hypotheses. This study is expected to provide empirical evidence regarding the effects of SAP and SIPD implementation on financial statement quality and the role of SPIP in strengthening these relationships. The findings are expected to provide useful insights for local governments in improving financial accountability, transparency, and the reliability of regional financial reporting.*

Keywords: *Financial Statement Quality; Government Accounting Standards; Government Internal Control System; Local Government; Regional Government Information System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan serta menguji peran moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei yang dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi penelitian mencakup seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD pada kedua kabupaten tersebut, dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3. Pengujian meliputi evaluasi model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas serta evaluasi model struktural untuk menguji hubungan antarvariabel dan hipotesis penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan SAP dan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan serta peran SPIP dalam memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; kualitas laporan keuangan; pemerintah daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga kualitas informasi yang disajikan harus relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Juliyanti, 2023). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis yang

Naskah Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 20 Juli 2026; Diterima: 22 Agustus 2026; Tersedia: 31 Agustus 2026

mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Apabila laporan keuangan tidak memenuhi standar kualitas, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara (Demung et al., 2025).

BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan telah melakukan pemeriksaan atas 545 LKPD Tahun 2023, sebanyak 54 LKPD memperoleh opini selain WTP yaitu 53 WDP dan 1 TMP. Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Hal ini menunjukkan sejumlah ketidaktertiban serta belum optimalnya pemenuhan standar akuntansi pemerintah. Meskipun Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK mencatat 22 catatan penting yang harus ditindaklanjuti, termasuk potensi kerugian negara sekitar Rp4 miliar. Sementara itu, di Kabupaten Bengkulu Utara, BPK juga menemukan bahwa laporan keuangan OPD belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Beberapa temuan mencakup Pengelolaan aset tetap yang belum memadai, Pengelolaan pajak daerah yang belum sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kehilangan potensi pendapatan, Penyajian nilai aset tak berwujud yang tidak sesuai SAP.

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan meliputi penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun di banyak OPD, penerapan SIPD masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas SIPD dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Selain faktor-faktor di atas, sistem pengendalian internal menjadi faktor penting, hal ini disebabkan karena sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi telah berjalan dalam jalur yang semestinya dan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tidak melakukan sebuah tindakan misconduct (COSO, 2013). Kondisi ini memperkuat pentingnya peran sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi, karena keberadaannya diyakini dapat memperkuat hubungan faktor-faktor utama dalam penelitian ini diantaranya penerapan SAP dan penerapan SIPD dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori stewardship. Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Sinergi dari penerapan

SAP, dan penerapan SIPD yang diperkuat dengan sistem pengendalian internal pemerintah (Mandacan, 2024) dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Selanjutnya, penelitian yang meneliti mengenai penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan beberapa hasil yang berbeda, seperti penelitian dari Tri Suci Katili, Harun Blongkod, Lukman Pakaya (2025) menghasilkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, penelitian dari Aprilia et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan SIPD memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang telah dilakukan merupakan bentuk dari research gap, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan hasil dari penelitian yang telah di teliti sebelumnya sehingga peneliti melakukan penelitian kembali dengan pembaharuan. Kebaharuan penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam memoderasi hubungan antara penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), terhadap kualitas laporan keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship

Teori Stewardship didefinisikan sebagai teori yang memperlihatkan keadaan dimana steward (pemerintah daerah) lebih mengutamakan pencapaian suatu organisasi dibandingkan dengan tujuan maupun kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1989). Sesuai dengan teori Stewardship, seorang pemangku kepentingan yang baik adalah seseorang yang selalu dapat menyampingkan kepentingan pribadi untuk tercapainya kepentingan bersama dalam suatu organisasi serta bertindak dengan menggunakan mekanisme situasional, dimana seorang pemimpin mampu untuk mengambil keputusan yang adil dalam kondisi apapun. Akuntansi organisasi sektor publik menghubungkan pemenuhan kebutuhan informasi antara steward (pemerintah daerah) dan principals (masyarakat).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kinerja suatu daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode, dan dapat mendukung untuk pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para penggunanya.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas organisasi, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Menerapkan SIPD terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hanafiah & Zulvia (2018) menemukan bahwa penerapan SIPD yang terintegrasi meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti halnya dengan pemerintahan daerah. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pengembangan Hipotesis

Pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat yaitu teknologi di bidang keuangan khususnya SIPD, bertujuan agar penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah transparan dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Rosiana Anjani, Sudrajat, & Bayu Framesthi (2024) menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, implementasi SIPD mampu meningkatkan ketepatan, keandalan, dan relevansi informasi keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel. H2: Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Oleh karena itu, pentingnya pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia agar mampu mengikuti tren teknologi untuk menyajikan informasi keuangan yang cepat, tepat, dan akurat sehingga terciptanya efektivitas SIPD yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. H4:

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Memoderasi Hubungan Antara Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen, dengan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebagai variabel independen. Ketiga variabel tersebut diharapkan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara penerapan SAP, dan penerapan SIPD dengan kualitas laporan keuangan.

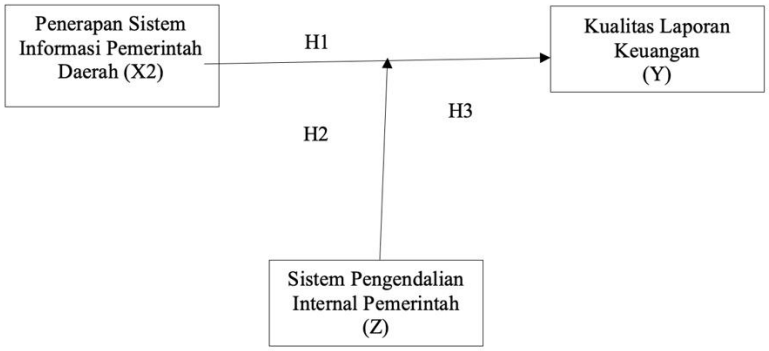

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei yaitu penelitian yang bersifat kuantitatif dalam meneliti perilaku objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, terdapat 31 OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah dan 32 OPD di Kabupaten Bengkulu Utara.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari responden, dan sumber data dalam penelitian ini adalan data berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen kuesioner. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan diolah menggunakan skala likert dengan interval.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini variabel independen adalah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini dituangkan dalam rumus-rumus statistik parametrik dengan penedekatan analisis structural equation model (SEM) dengan menggunakan partial least square (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 3. Analisis PLS (Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran (Outer Model) dan pengujian model struktural (Inner Model). Model pengukuran (Outer Model) dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sementara, model struktural (Inner Model) dilakukan untuk menguji kausalitas (sebab-akibat) atau pengujian hipotesis dengan model prediksi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling (SEM) dengan SmartPLS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Dari kusioner yang didistribusikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat sebanyak 62 tanggapan terkait dengan kuesioner dengan responden rate 100% sehingga seluruh kuesioner yang bisa diolah sebanyak 62 dengan responden rate 100%.

Tabel 1. Statistik Deskripsi Responden

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	30	48%
Perempuan	32	52%
Total	62	100%
Usia		
26-35 Tahun	16	26%
36-45 Tahun	37	60%
> 45 Tahun	9	14%
Total	62	100%
Pendidikan Terakhir:		
S1	44	64%
S2	20	36%
Total	62	100%

Dari hasil kuesioner yang sudah terkumpul ditabulasikan kemudian diolah menggunakan software Smart PLS 4.

Tabel 2. Statistrik deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Standar Deviasi
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
KLK	62	8	40	24	29	40	35,34	3,81
SIPD	62	10	50	30	20	50	43,35	8,20
SPIP	62	10	50	30	36	50	43,35	4,92

Evaluasi Measurement (Outer Model)

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan evaluasi measurement (outer) model yaitu dengan menggunakan convergent validity besarnya loading factor untuk masing-masing > 0,70 terhadap variabel yang dituju.

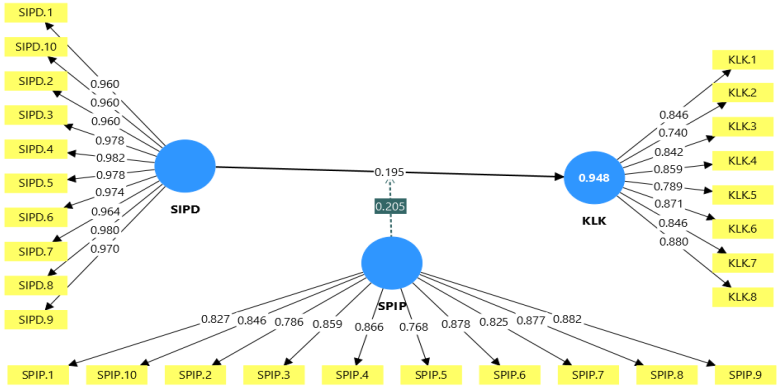

Gambar 2. Hasil PLS Algorithm

Tabel 3. Cross Loading

	KLK	SIPD	SPIP	SPIP x SIPD
KLK.1	0,846	0,281	0,792	0,058
KLK.2	0,74	0,126	0,666	0,191
KLK.3	0,842	0,18	0,798	0,09
KLK.4	0,859	0,031	0,821	0,228
KLK.5	0,789	-0,005	0,723	0,2
KLK.6	0,871	0,247	0,83	0,068
KLK.7	0,846	0,303	0,769	0,079
KLK.8	0,88	0,211	0,827	0,179
SIPD.1	0,184	0,96	-0,005	0,008
SIPD.10	0,233	0,96	0,043	-0,038
SIPD.2	0,18	0,96	-0,005	0,008
SIPD.3	0,166	0,978	-0,021	0,018
SIPD.4	0,188	0,982	-0,001	0,002
SIPD.5	0,198	0,978	0,018	-0,003
SIPD.6	0,176	0,974	-0,006	-0,006
SIPD.7	0,174	0,964	-0,005	-0,007
SIPD.8	0,246	0,98	0,061	-0,016
SIPD.9	0,257	0,97	0,064	-0,023
SPIP.1	0,82	0,194	0,827	-0,042
SPIP.10	0,77	-0,098	0,846	0,089
SPIP.2	0,701	-0,033	0,786	-0,088
SPIP.3	0,782	-0,007	0,859	-0,101
SPIP.4	0,8	-0,13	0,866	0,062

SPIP.5	0,739	-0,15	0,768	0,049
SPIP.6	0,815	0,086	0,878	-0,096
SPIP.7	0,794	0,137	0,825	-0,091
SPIP.8	0,827	0,051	0,877	0,016
SPIP.9	0,806	0,081	0,882	-0,112
SPIP x SIPD	0,16	-0,008	-0,038	1.00

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa tiap tiap variabel telah memilli nilai Rata-rata Varians Diekstrak (AVE) > 0,5 sehingga seluruh variabel dapat disimpulkan valid.

Tabel 4. Pengukuran dengan Kriteria Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
KLK	0,698
SIPD	0,942
SPIP	0,709

Dari hasil Smart PLS di atas semua konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan cronbach's alpha diatas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan memenuhi kriteria uji reliabilitas

Tabel 5. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	***Composite Reliability***
KLK	0,938	0,949
SIPD	0,993	0,994
SPIP	0,954	0,961

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R-Square variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,948, artinya sebesar 94,8% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel sistem informasi pemerintahan daerah, pengendalian internal pemerintahan sebesar dan sebesar 5,2% lainnya di jelaskan oleh faktor lain yanb tidak terdapat dalam persamaan ini.

Tabel 6. R-Square

Variabel	***R-Square***
KLK	0,948

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi yaitu membandingkan nilai t-statistic dengan t-tabel signifikansi α=5% (1,96).

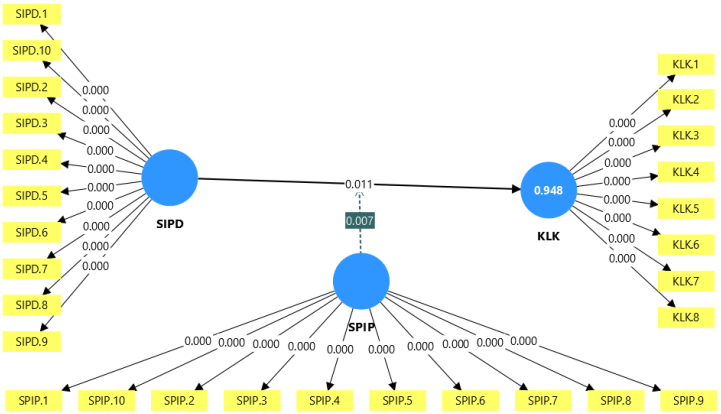

Gambar 3. Hasil Boostraping

Tabel 7. Path Coefficient (Mean, STDEV, t-Values)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (S)	Standar Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STERR)	P-Value	Ket
SIPD-> KLK	0,195	0,179	0,084	2,307	0,011	Diterima
SPIPxSIPD -> KLK	0,205	0,183	0,083	2,083	0,007	Diterima

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji hubungan antara sistem informasi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan, menunjukkan nilai sampel asli (original sample) sebesar 0,195 dan t-statistik 2,307. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian telah memenuhi tingkat signifikansi 5%= 1,96 dengan p-value sebesar 0,011 dan untuk nilai sampel asli (original sampel) bernilai positif, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan sistem informasi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan, menunjukkan nilai sampel asli (original sample) sebesar 0,205 dan t-statistik 2,480. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian telah memenuhi tingkat signifikansi 5% = 1,96 dengan p-value sebesar 0,011 dan untuk nilai sampel asli (original sampel) bernilai positif, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa, sistem informasi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini juga diperkuat dengan jawaban responden standar akuntansi pemerintah dengan kuisioner yang telah disebarkan di Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana rata rata responden memiliki kecenderungan menyatakan bahwa semakin

taat melaksanakan pekerjaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan maka hal ini memberikan dampak dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin efektif penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memoderasi hubungan antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi hubungan antara sistem informasi pemerintahan daerah dan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa jika sistem pengendalian internal di jalankan dengan baik di dalam organisasi maka hal ini membantu menguatkan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sehingga meningkatkan peranan karyawan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hubungan ini, SPIP berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. SPIP memastikan bahwa data yang diolah dalam SIPD dicatat, diverifikasi, dan dilaporkan sesuai prosedur serta terhindar dari kesalahan dan penyimpangan. Dengan demikian, semakin baik penerapan SPIP, semakin optimal pemanfaatan SIPD dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang efektif memungkinkan pengelolaan dan penyajian data keuangan dilakukan secara lebih akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena semakin baik penerapan SIPD, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh positif tersebut menjadi semakin kuat dengan adanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif, karena SPIP memastikan proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai prosedur serta terhindar dari kesalahan dan penyimpangan. Dengan demikian, SPIP memoderasi dan memperkuat pengaruh positif SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Aprilia, N., Satriawan, I., & Dwitayanti, Y. (2025). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Palembang. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 17*(3), 1317–1333. https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1050

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework.*

Darmawan, E. (2019). The effect of government accounting standards and government internal control systems on the quality of local government financial statements. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 1*(2), 108–111. https://doi.org/10.35310/jass.v1i02.243

Demung, I. W., Judujanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). *Pengantar akuntansi sektor publik: Teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1989). CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *The Academy of Management*.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management, 16*(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Hanafiah, A. F., & Zulvia, D. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi di PT Cipta Niaga Semesta*.

Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas publik dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia (Public accountability and disclosure of local government financial statements [LKPD] in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis (RAMBIS), 3*(1), 1–17.

Katili, T. S., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2025). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 6*(3), 1938–1947. https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.7166

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020

Mandacan, F. (2024). *Peran partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen dan budaya organisasi sebagai pemediasi terhadap kinerja aparatur pemerintah [The role of budget participation, clarity of budget targets, commitment and organizational culture as mediator of government apparatus performance]* [Disertasi, Universitas Hasanuddin].

Nisa, A. R., Zuhroh, D., & Cahyaningsih, D. S. (2026). Effects of regional information and internal control systems on financial report quality and fraud prevention. *Journal of Contemporary Accounting, 8*(1). https://doi.org/10.20885/jca.vol8.iss1.art1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rosiana Anjani, N. A., Gunardi, G., Sudrajat, A., & Bayu Framesthi, D. B. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Cicalengka. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 18*(1). https://doi.org/10.56244/jimia.v18i1.843